

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat disampaikan dari hasil Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma Damarsi pada tanggal 03 Desember 2018 hingga 12 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa calon apoteker hendaknya lebih berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan PKPA di Apotek agar dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelayanan dan pengelolaan apotek sehingga kelak dapat diaplikasikan dalam menjalankan praktik profesi di tengah masyarakat.
- b. Dalam memberikan KIE kepada pasien hendaknya lebih ditingkatkan lagi, sehingga pasien benar-benar paham dengan apa yang disampaikan dan dapat meningkatkan kepatuhan pasien, sehingga obat tersebut dapat memberikan efek terapi yang diharapkan.
- c. Pemantauan terapi pasien seperti *homecare* dan kegiatan *telepharma* hendaknya lebih ditingkatkan lagi untuk membantu pasien dalam meningkatkan kualitas terapi dan menunjukkan peran apoteker terhadap masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- American Pregnancy Association, 2019. Promoting Pregnancy Wellness. <http://americanpregnancy.org/pregnancy-health/nutrients-vitamins-pregnancy/> [online]. Diakses pada Februari 2019.
- BNF, 2018. *BNF Children: The Essential Resource for Clinical Use of Medicines in Children*. BMJ Group, London.
- BNF, 2018. *British National Formulary 76th Edition*. BMJ Group, London.
- Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2006, *Pedoman Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas*, Jakarta, hal. 12.
- Drugbank, 2019. Drugbank: <https://www.drugbank.ca/> [online]. Diakses pada Juli 2019.
- Farkouh, A., Frigo, P. and Czejka, M., 2016. Systemic Side Effects of Eye Drops: A Pharmacokinetic Perspective. *Clinical Ophthalmology*, **10**, 2433–2441.
- James, P.A., Oparil, S., Carter, B.L., Cushman, W.C., Dennison-Himmelfarb, C., Handler J., *et al.* 2014. Evidence-Based Guideline for the Management of High Blood Pressure in Adults: Report from the Panel Members Appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8), *JAMA*, 311(5): 507-520.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 347/MENKES/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotik.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
- Medscape, 2019. Medscape: Drug & Diseases. <http://reference.medscape.com> [online]. Diakses pada Juli 2019.

MIMS, 2019. MIMS Indonesia. <https://www.mims.com/Indonesia> [online]. Diakses pada Juli 2019.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor: Hk.00.05.41.1384 Tahun 2005 tentang Kriteria dan Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria Obat Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.922/MENKES/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Apotik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan

- Nomor 889 tahun 2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2017 tentang Apotek.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- Pionas, 2019. Pusat Informasi Obat Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan, <http://pionas.pom.go.id> [online]. Diakses pada Juli 2019.
- Ramsar, U., Darmawansyah dan Nurhayani, 2012. Penerapan Fungsi Manajemen di Puskesmas Minasa Upa Kota Makassar Tahun 2012. *Skripsi Sarjana Kesehatan Masyarakat*. Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. 7.
- Rang, H.P., Dale, M.M., Ritter, J.M., Flower, R.J., Henderson, G., 2012. Drugs Used for The Treatment of Infections, Cancer and Immunological Disorders. Dalam: *Rang & Dale's Pharmacology 7th Edition*. London: 625-628.
- Seto, S., Nita, Y. dan Triana, L., 2015. Manajemen Farmasi ed. 3. Airlangga University Press, Surabaya.
- Shann, F., 2017. *Drug Doses 17th Edition*. University of Melbourne, Australia.
- Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : PO. 005/ PP.IAI/1418/VII/2014 tentang Peraturan Organisasi tentang Papan Nama Praktik Apoteker.
- Sweetman, S.C., 2009. *Martindale The Complete Drug Reference 36th Edition*. Pharmaceutical Press, London.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

William, L. and Wilkins, 2015. *Lippincott Illustrated Reviews: Pharmacology 6th Edition*. USA: Phyladelphia.